

**Bab 1:**  
**Standar-standar**  
**Minimum**  
**Di Semua Sektor**

## *Bagaimana menggunakan bab ini*

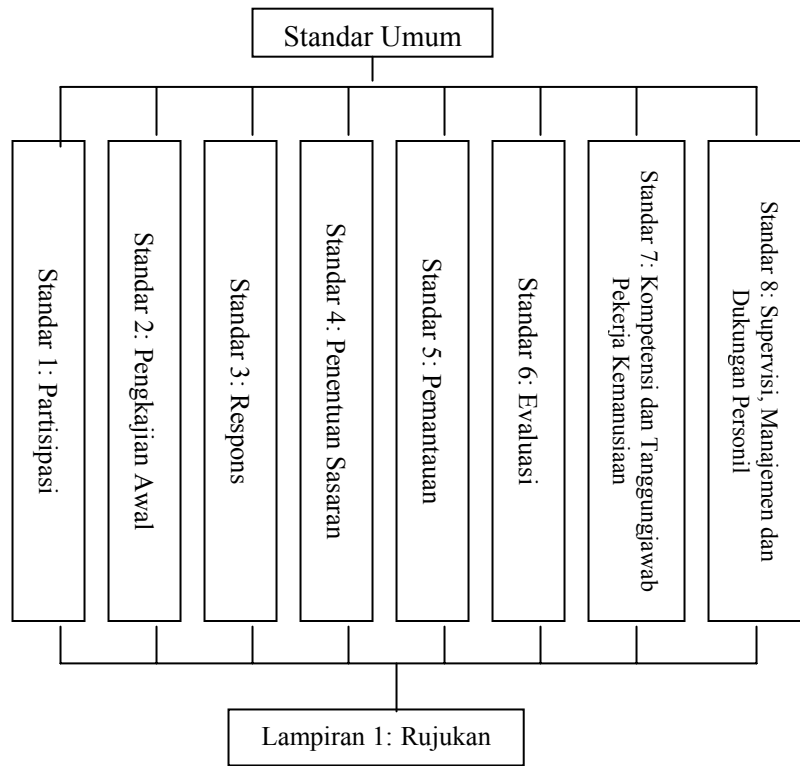
Bab ini merinci delapan standar-standar inti tentang ‘proses dan orang’ yang terkait dengan masing-masing sektor teknis. Standar-standar ini adalah 1) partisipasi, 2) kajian awal, 3) respons, 4) penentuan target, 5) pemantauan, 6) evaluasi, 7) kompetensi dan tanggung jawab pekerja kemanusiaan dan 8) supervisi, manajemen, dan dukungan terhadap personil. Masing-masing standar memuat hal-hal berikut:

- **standar minimum:** standar ini pada hakekatnya bersifat kualitatif dan menentukan tingkat minimum khusus yang akan dipenuhi;
- **indikator-indikator kunci:** ini adalah ‘tengara’ yang menunjukkan apakah standar telah tercapai. Tanda-tanda ini dimaksudkan untuk memberikan suatu cara untuk mengukur dan mengkomunikasikan dampak, atau hasil, dari program dan juga proses atau metoda yang digunakan. Indikator-indikator ini bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif;
- **catatan-catatan panduan:** catatan ini meliputi butir-butir spesifik yang patut dipertimbangkan ketika menerapkan standar-standar dan indikator-indikator pada situasi yang berbeda-beda, panduan untuk mengatasi masalah-masalah praktis, dan saran-saran tentang penentuan prioritas, dan menggambarkan permasalahan, pertentangan, atau kesenjangan pada rangkaian pengetahuan yang ada saat ini.

Bab ini diikuti dengan suatu pilihan bahan-bahan rujukan, yang membawa kita pada sumber dari informasi tentang isu-isu baik yang bersifat umum maupun teknis yang terkait dengan standar-standar yang dibahas.

## *Daftar Isi*

Pendahuluan	29
1. Partisipasi	34
2. Pengkajian Awal	36
3. Respons	41
4. Penentuan Sasaran	43
5. Pemantauan	45
6. Evaluasi	47
7. Kompetensi dan Tanggungjawab Petugas Kemanusiaan	48
8. Supervisi, Manajemen dan Dukungan Personil	49
Lampiran 1: Rujukan	51



## ***Pendahuluan***

Berikut ini adalah standar-standar umum yang terkait dengan, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari, masing-masing bab. Dengan menerapkan standar-standar umum ini, lembaga-lembaga-lembaga kemanusiaan membantu pencapaian standar-standar di bab-bab teknis.

### **Kaitan dengan instrumen-instrumen hukum internasional**

Setiap orang mempunyai hak terhadap kehidupan yang bermartabat dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lembaga-lembaga kemanusiaan mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan bantuan yang selaras dengan hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpartisipasi, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak terhadap informasi, seperti tercermin dalam kumpulan hukum-hukum internasional hak asasi manusia, humaniter, dan pengungsian. Dalam Piagam Kemanusiaan dan Kode Perilaku untuk Gerakan Internasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Organisasi Non-Pemerintah (NGOs, ORNOP) pada Bantuan Bencana, lembaga-lembaga kemanusiaan mengikat diri mereka menjadi akuntabel kepada orang-orang yang mereka coba untuk bantu. Standar-standar umum berikut menggariskan tanggung-jawab dari organisasi dan orang-perorangan ketika menyediakan perlindungan dan bantuan.

### **Pentingnya standar-standar lintas sektor**

Program-program yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduk terkena bencana harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang konteks. Pengkajian awal akan menganalisis hakekat bencana dan akibatnya terhadap suatu penduduk. Kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh orang-orang yang terkena harus diidentifikasi bersama-sama dengan pengkajian tentang kebutuhan dan kerentanan mereka serta adanya kesenjangan-kesenjangan di antara pelayanan-pelayanan dasar. Tidak boleh ada satupun sektor yang dipandang terpisah dari sektor-sektor yang lain, atau terpisah dari faktor-faktor ekonomi, keagamaan dan kepercayaan tradisional, kebiasaan-kebiasaan sosial, politik

dan keamanan, mekanisme-mekanisme pemecahan masalah, atau dari perkembangan-perkembangan yang dipandang akan terjadi di kemudian hari. Analisis terhadap sebab dan akibat bencana sangatlah penting. Kalau masalah-masalah ini tidak diidentifikasi dan dipahami secara benar, niscaya akan sulit, atau bahkan tidak mungkin untuk dapat merespons secara tepat.

Respons ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk kemampuan organisasi, wilayah kepakaran, keterbatasan anggaran, pengenalan wilayah dan situasi dan keamanan serta risiko yang dihadapi pekerjajafnya. Standar-standar respons yang diuraikan di sini dirancang untuk menjelaskan 'siapa melakukan apa dan kapan'. Ketika suatu respons yang tepat sudah ditentukan, mekanisme penentuan target harus sudah disusun untuk memungkinkan lembaga untuk menyediakan bantuan berdasarkan kebutuhan secara berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Sistem-sistem pemantauan harus disusun sejak awal proses untuk secara terus-menerus mengukur kemajuan dibanding sasaran dan untuk memastikan keberlanjutan relevansi antara program dengan konteks yang terus berubah. Suatu evaluasi, yang mungkin dilaksanakan pada akhir atau pada akhir respons, menentukan keseluruhan efektivitas dari program dan menentukan pelajaran-pelajaran yang dapat meningkatkan program semacam itu di kemudian hari.

Mutu dari bantuan kemanusiaan akan ditentukan oleh ketrampilan, kemampuan, pengetahuan dan komitmen dari pekerja dan relawan yang bekerja dalam kondisi-kondisi yang sulit dan seringkali berbahaya. Manajemen dan supervisi yang baik adalah unsur penting dari program bantuan dan, bersama dengan penguatan kapasitas, dapat membantu untuk memastikan dipentingkannya standar-standar minimum bantuan kemanusiaan. Mengingat pentingnya jender dan beberapa isu-isu lintas sektoral lainnya, keragaman personil harus diusahakan ketika sedang membentuk suatu tim.

Partisipasi orang-orang yang terkena bencana – termasuk kelompok-kelompok rentan di bawah ini – dalam pengkajian, pengembangan, pelaksanaan, dan pemantauan respons bencana harus dupayakan semaksimal mungkin untuk memastikan kepatutan dan mutu dari suatu respons bencana. Tukar menukar informasi dan pengetahuan secara sistematis diantara mereka-mereka yang terlibat dalam respons bencana adalah penting untuk mencapai suatu keselarasan pemahaman tentang masalah-masalah dan efektifitas koordinasi antar lembaga.

### **Kaitan dengan bab-bab yang lain**

Patut diingat bahwa bab ini harus dibaca terlebih dahulu sebelum melanjutkan dengan sektor teknis yang terkait.

### **Kerentanan dan kemampuan penduduk-penduduk yang terkena bencana**

Kelompok-kelompok yang paling sering menghadapi risiko dalam situasi bencana adalah perempuan, anak-anak, para usia lanjut, penyandang cacat dan orang-orang hidup dengan HIV/AIDS. Dalam konteks-konteks tertentu orang-orang bisa juga menjadi rentan sehubungan dengan asal kesukuan, keanggotaan keagamaan atau politik, atau karena mengungsi. Daftar ini jauh dari lengkap tetapi sudah memuat orang-orang yang paling sering diidentifikasi sebagai kelompok rentan. Kerentanan-kerentanan khusus mempengaruhi kemampuan orang untuk mengatasi masalah dan mempertahankan kehidupan pada suatu bencana, dan mereka yang paling berisiko harus diidentifikasi dalam setiap konteks yang sedang dihadapi.

Sepanjang buku ini, istilah ‘kelompok rentan’ mengacu kepada semua kelompok rentan tersebut. Ketika suatu kelompok dipandang berisiko, maka kemungkinan bahwa kelompok-kelompok yang lainnya juga mengalami ancaman yang sama. Oleh sebab itu, bilamana istilah kelompok rentan digunakan, maka para pembaca didorong untuk memikirkan semua kelompok yang ada dalam kategori rentan.

## Standar-standar minimum

### Standar umum 1: partisipasi

Penduduk terkena bencana secara aktif berpartisipasi dalam pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari program bantuan.

**Indikator-indikator kunci** (untuk dibaca bersama-sama dengan catatan-catatan panduan)

- Perempuan dan laki-laki dari segala kelompok umur dari penduduk yang terkena bencana maupun dari masyarakat luas, termasuk kelompok-kelompok rentan, menerima informasi tentang program bantuan, dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada lembaga bantuan di semua tahapan siklus proyek (lihat catatan panduan 1).
- Tujuan-tujuan dan rencana-rencana tertulis dari program bantuan harus mencerminkan kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan nilai-nilai dari orang-orang terkena bencana khususnya yang termasuk kelompok rentan dan program itu membantu penyediaan perlindungan terhadap mereka (lihat catatan panduan 1-2)
- Pemrograman dirancang untuk memaksimalkan penggunaan ketrampilan-ketrampilan dan kemampuan-kemampuan lokal (lihat catatan panduan 3-4)

#### Catatan panduan

1. **Perwakilan dari semua kelompok:** partisipasi orang-orang yang terkena bencana dalam pembuatan keputusan di semua tahapan siklus proyek (pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) ikut memastikan pelaksanaan program-program yang berkeadilan dan efektif. Kita harus mengupayakan partisipasi yang berkeseimbangan dari orang-orang yang terlibat dalam program bantuan, termasuk dari kelompok rentan dan terpinggirkan. Partisipasi memastikan bahwa program-program didasarkan atas kerjasama sukarela dari orang-orang yang terkena bencana dan menghargai



budaya setempat, selama hal ini tidak merongrong hak-hak orang-perorangan. Program harus mencerminkan saling ketergantungan antara orang-perorangan, rumah-rumahtangga, dan masyarakat-masyarakat dan memastikan bahwa unsur perlindungan tidak terabaikan.

2. **Komunikasi dan transparansi:** saling tukar informasi dan pengetahuan diantara semua yang terlibat adalah sangat penting untuk pemahaman masalah yang lebih baik dan untuk memberikan bantuan secara terkoordinasi. Hasil kajian awal harus secara aktif dikomunikasikan kepada semua organisasi dan orang-orang yang terkait. Harus disusun mekanisme untuk mengajak orang-orang memberikan masukan program, misalnya melalui pertemuan-pertemuan umum atau melalui prganisasi-organisasi berbasis masyarakat. Untuk orang-orang yang tidak dapat meninggalkan rumah atau menyandang cacat, harus diupayakan cara-cara agar program dapat mencapai mereka.
3. **Kemampuan lokal:** partisipasi dalam program harus memperkuat rasa bermartabat dan harapan orang-orang dalam masa krisis semacam itu, dan orang-orang harus didorong untuk berpartisipasi dalam programmelalu berbagai cara. Program-program harus dirancang untuk membangun dari kapasitas lokal untuk menghindarkannya dari merongrong strategi-strategi pengatasan masalah dari orang-orang itu sendiri.
4. **Keberlanjutan jangka panjang:** keuntungan jangka panjang biasanya terealisasi selama pelaksanaan openguatan kapasitas lokal dalam mengahdapi bencana. Suatu program respons bencana harus mendukung dan/atau melengkapi pelayanan-pelayanan lokal dan lembaga-lembaga lokal yang sudah ada dan dirancang untuk tetap berfungsi setelah bantuan dari luar dihentikan. Organisasi-organisasi lokal dan pemerintah nasional mempunyai tanggung jawab utama terhadap penduduk dan harus, sejauh memungkinkan, dilibatkan dalam konsultasi dalam perancangan program jangka panjang.

## Standar umum 2: kajian awal

Kajian memberikan suatu pemahaman tentang situasi bencana dan suatu analisis yang jelas tentang ancaman terhadap kehidupan, martabat, kesehatan, dan penghidupan. Berdasarkan konsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang, menentukan apakah dibutuhkan respons dari luar dan kalau memang demikian respons macam apa yang diperlukan

**Indikator-indikator kunci** (untuk dibaca bersama catatan – catatan panduan)

- Informasi dikumpulkan dengan menggunakan tatacara-tatacara yang baku dan disediakan untuk memungkinkan pembuatan keputusan yang transparan (lihat catatan panduan 1-6)
- Pengkajian mempertimbangkan semua sektor-sektor teknis (air bersih dan sanitasi, gizi, pangan, hunian, kesehatan) dan lingkungan fisik, social, ekonomi, politik, dan keamanan (lihat catatan panduan 7)
- Melalui konsultasi, pengkajian memperhitungkan respons dari pihak yang berwenang di tingkat lokal dan nasional juga pelaku-pelaku dan lembaga-lembaga yang lain (lihat catatan panduan 7)
- Kemampuan-kemampuan lokal dan strategi-strategi pengatasan masalah bencana, baik dari mereka yang terkena bencana maupun penduduk disekitar, diidentifikasi (lihat catatan panduan 8)
- Bilamana memungkinkan data dipilah-pilah berdasarkan kelamin dan umur (lihat catatan panduan 9)
- Pengkajian ditentukan oleh hak-hak dari mereka yang terkena bencana seperti ditentukan oleh hukum internasional
- Pengkajian mempertimbangkan tanggungjawab pihak-pihak berwenang yang terkait untuk melindungi dan membantu penduduk di wilayah dibawah kekuasaan mereka, dan juga mempertimbangkan hukum, standar dan panduan-panduan nasional yang berlaku di wilayah dimana terdapat penduduk yang terkena bencana sejauh aturan-aturan itu selaras dengan hukum internasional.

- Pengkajian meliputi suatu analisis tentang lingkungan yang ada, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan keamanan orang-perorangan dari penduduk yang terkena bencana dan juga dari para pekerja kemanusiaan (lihat catatan panduan 10)
- Perkiraan jumlah penduduk dicocokkan ulang dan diperiksa ulang dengan sebanyak mungkin sumber acuan yang ada, dan dasar-dasar yang melandasi ramalan dinyatakan dengan jelas.
- Temuan-temuan dari pengkajian disediakan kepada sektor-sektor lain, pemerintah daerah dan nasional dan jug awakil-dakil dari penduduk yang terkena bencana. Saran-saran disusun sehubungan dengan diperlukannya bantuan dari luar, dan sehubungan dengan respons-respons yang harus dikaitkan dengan strategi-strategi untuk transisi dan pengakhiran bantuan.

Daftar periksa (*Checklist*) untuk kajian dari masing-masing sektor dapat dilihat pada lampiran dan pada akhir masing-masing sektor teknis.

#### **Catatan-catatan panduan**

1. **Kajian awal:** menyediakan dasar-dasar untuk penyampaian dari segala bantuan mendesak yang mungkin diperlukan dan juga mengidentifikasi bidang-bidang dimana kajian yang lebih mendalam seharusnya difokuskan. Suatu kajian awal bukan merupakan suatu tujuan akhir, melainkan harus dilihat sebagai badian dari proses pemantauan, khsuusnya ketika situasi berubah dengan cepat, atau ketika terjadi perkembangan yang kritis misalnya perpindahan sejumlah besar penduduk atau merebaknya suatu penyakit. Seringkali suatu kajian tidak dapat berkonsultasi dengan semua sektor dan kelompok-kelompok dari penduduk. Dalam keadaan semacam itu maka kajian itu harus menyebutkan dengan jelas kelompok penduduk mana yang tidak dapat dilibatkan dan harus diupayakan agar mereka akan dimintai pendapat sesegera mungkin.

2. **Checklist:** terdapat cara untuk memastikan bahwa bidang kunci telah diperiksa dan contoh-contoh checklist disediakan pada lampiran masing-masing bab teknis pada buku pegangan ini. Informasi tambahan dapat dilihat pada lampiran-1: lihat halaman xxx
3. **Kecepatan:** suatu kajian awal harus dilaksanakan secepatnya setelah bencana terjadi, berbarengan dengan usaha-usaha untuk mengatasi masalah yang mengancam kehidupan dan pemenuhan kebutuhan kritis lainnya. Laporan kajian harus dihasilkan dalam beberapa hari saja. Format serta isinya harus memberi kesempatan bagi para perencana dan analis untuk dengan mudah mengidentifikasi prioritas dan memberikan cukup informasi untuk merancang suatu program yang memadai dengan cepat. Suatu kajian yang bersifat lebih mendalam akan diperlukan dikemudian hari untuk mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan diantara bantuan dan untuk menyediakan informasi baseline.
4. **Tim kajian:** kualitas kajian dapat ditingkatkan apabila susunan tim yang dibentuk berkeseimbangan jender, terdiri dari para pakar umum dan spesialis teknis yang terkait, dengan kerangka acuan yang jelas, dan dengan aktif mengusahakan keterlibatan penduduk melalui cara-cara yang dapat diterima secara budaya. Pengetahuan lokal dan pengalaman penanganan bencana pada masa lalu di wilayah asal dianggap sangat penting.
5. **Pengumpulan informasi:** anggota tim harus mempunyai pandangan yang jelas mengenai tujuan dan metodologi pengkajian dan juga tentang peran mereka sebelum pekerjaan lapangan dimulai, dan biasanya digunakan suatu gabungan antara metoda kualitatif dan kuantitatif. Beberapa orang-perorangan atau kelompok-kelompok mungkin tidak dapat mengemukakan pendapat secara bebas, maka tim kajian mungkin mempertimbangkan pengaturan-pengaturan tertentu untuk memungkinkan pengumpulan informasi yang sensitive, informasi harus ditangani dengan hati-hati dan asas kerahasiaan harus dipastikan. Hanya setelah mendapatkan persetujuan pribadi maka suatu informasi baru dapat

dipertimbangkan untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang paling berkepentingan. Pekerja yang berkerja dalam situasi konflik perlu untuk menyadari bahwa informasi yang dikumpulkan mungkin bersifat sensitive, dan dapat disalahgunakan dan dengan demikian akan mengurangi kemampuan lembaga itu sendiri untuk beroperasi.

6. **Sumber informasi:** informasi untuk laporan kajian dapat dikumpulkan dari sumber-sumber primer, termasuk observasi dan diskusi-siskusi dengan orang-perorangan kunci, seperti pekerja lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh Masyarakat (dari kedua jenis jender), para tetua, anak-anak, pekerja kesehatan, para pedangand dan pelaku-pelaku lain yang terkait, dan juga dari sumber-sumber sekunder seperti literatur dan laporan-laporan yang sudah tersedia (baik yang diterbitkan atau tidak), bahan-bahan histories yang ada dan data dari pra-bencana. Rencana-rencana penanggulangan bencana nasional dan regional juga merupakan sumber informasi yang berharga. Pembandingan antara informasi sekunder dengan observasi dan penilaian langsung merupakan langkah penting untuk mengurangi potensi bias. Metoda pengumpulan data dan keterbatasan dari data yang dihasilkan harus dikomunikasikan secara jelas untuk menghasilkan suatu penggambaran situasi yang realistik. Laporan kajian harus dengan jelas menunjukkan masalah-masalah yang khusus dan rekomendasi-rekomendasi dari berbagai kelompok khususnya mereka-mereka yang tergolong rentan.
7. **Kajian sektoral:** suatu kajian multisektoral mungkin tidak selalu dapat dilaksanakan pada tahap awal dari bencana dan bahkan dapat menghambat tindakan pemenuhan kebutuhan yang paling kritis pada suatu sektor tertentu. Bilamana pengkajian sektoral dilaksanakan secara terpisah, maka harus diperhatikan, berdasarkan konsultasi dengan pelaku-pelaku dan lembaga-lembaga yang lain, untuk menghubungkan dengan sektor-sektor yang lain dan untuk memperluas isu- isu kontekstual dan isu-isu perlindungan.

8. **Hubungan dengan penduduk sekitar:** penyediaan fasilitas dan dukungan untuk pengungsi dapat menimbulkan kecemburuan masyarakat sekitar, apalagi kalau sumberdayanya terbatas dan harus dibagikan pula untuk para pendatang baru. Untuk mengurangi ketegangan, masyarakat setempat harus diajak berembung dan, bilamana memungkinkan, pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan-pelayanan untuk para pengungsi juga harus merupakan perbaikan berkelanjutan untuk kehidupan penduduk setempat.
9. **Pemilahan data:** Tindakan ini memungkinkan pengguna memeriksa ketepatan hasil kajian dan memungkinkan perbandingan dengan kajian-kajian sebelumnya di bidang yang sama. Disamping berdasar umur, jender dan kerentanan, dsb., perlu juga dimasukkan rata-rata ukuran keluarga dan jumlah rumahtangga karena ini akan membantu perencanaan respons yang lebih baik. Pada tahap awal bencana mungkin agak sulit untuk memilah data berdasar umur dan jender. Bagaimanapun, mortalitas dan morbiditas anak-anak dibawah lima tahun harus didahulukan karena golongan penduduk ini biasanya paling berisiko. Kalau waktu dan kondisi memungkinkan maka pemilahan yang lebih rinci harus diusahakan untuk menentukan lebih jauh perbedaan-perbedaan berdasarkan umur, kelamin dan kerentanan.
10. **Konteks-konteks mendasar:** pengkajian dan analisis yang mengikuti kemudian harus mempertimbangkan isu-isu structural, political, keamanan, ekonomik, demografik, dan lingkungan yang mendasari masalah. Pertimbangan juga harus dilakukan berkenaan dengan perubahan-perubahan dalam kondisi kehidupan dan struktur Masyarakat baik diantar apenduduk setempat dan penduduk yang mengungsi.
11. **Pemulihan:** analisis dan perencanaan untuk periode pemulihan pasca bencana harus menjadi bagian dari kajian awal, karena upaya-upaya pemulihan diri dapat terhambat oleh bantuan dari luar yang disediakan sedemikian rupa tanpa membantu mekanisme-mekanisme pertahanan hidup dari penduduk setempat.

### **Standar umum 3: respons**

Suatu respons kemanusiaan diperlukan dalam situasi dimana pihak-pihak yang berwenang terkait tidak mampu atau tidak bersedia untuk merespons kebutuhan perlindungan dan bantuan dari penduduk yang berada di wilayah kekuasaannya, dan bilamana kajian dan analisis menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi.

**Indikator-indikator kunci:** (untuk dibaca bersama-sama dengan catatan-catatan panduan)

- Dalam situasi dimana kehidupan orang-orang terancam akibat kejadian bencana, program-program mengutamakan pemenuhan kebutuhan penyelamatan kehidupan (lihat catatan panduan 1)
- Program-program dan proyek-proyek dirancang untuk memberikan dukungan dan perlindungan terhadap penduduk terkena bencana dan untuk menggalakkan penghidupan mereka, sehingga mereka memenuhi atau melampaui standar-standar minimum Sphere, seperti digambarkan dalam indikator-indikator kunci (lihat catatan panduan 2)
- Terdapat koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif diantara mereka yang terkena dan pihak-pihak yang terlibat dalam respons bencana. Lembaga-lembaga kemanusiaan melaksanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan, dimana kepakaran dan kemampuan mereka dapat memberikan dampak yang terbesar dalam konteks keseluruhan program bantuan (lihat catatan panduan 3)
- Organisasi-organisasi, program-program, dan proyek-proyek yang tidak dapat memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi atau tidak mampu memenuhi standar-standar minimum Sphere memberitahukan kesenjangan-kesenjangan itu sehingga pihak-pihak lain dapat memberikan bantuan (lihat catatan panduan 4-5)
- Dalam situasi konflik, program bantuan mempertimbangkan kemungkinan dampak dari respons terhadap dinamika situasi konflik yang ada (lihat catatan panduan 6)

**Catatan panduan**

1. **Merespons kebutuhan yang sungguh ada:** respons kemanusiaan harus diorganisir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah dikaji. Perlu diperhatikan bahwa bahan-bahan berlebihan yang justru dapat mengganggu tidak boleh diikutsertakan dalam saluran-saluran pengiriman bahan-bahan esensial.
2. **Memenuhi Standar-standar Minimum:** program-program dan proyek-proyek harus dirancang untuk menutupi kesenjangan antara kondisi kehidupan yang ada dan Standar-standar Minimum Sphere. Walaupun demikian, kebutuhan darurat harus dibedakan dari kebutuhan kronis suatu penduduk korban bencana. Kesenjangan memang selalu ada antara kebutuhan kemanusiaan dan sumberdaya yang diperlukan untuk membawa suatu masyarakat, wilayah, kawasan atau bahkan Negara mencapai Standar-Standar Minimum Sphere, yang selalu lebih besar ketimbang sumberdaya yang ada. Satu lembaga saja tidak dapat diharapkan untuk melakukan ini sendirian dan masyarakat, tetangga mereka, pemerintah setempat, para donor dan organisasi lokal dan internasional lainnya mempunyai peran penting untuk dimainkan. Koordinasi diantara mereka semua ini sangat penting untuk mengatasi kesenjangan itu.
3. **Kemampuan dan kepakaran:** Dalam situasi dimana organisasi mempunyai spesialisasi, atau diberi mandat khusus untuk memenuhi kebutuhan (atau kelompok-kelompok) tertentu, maka mereka harus berusaha untuk memberikan dampak kemanusiaan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya dan ketrampilan mereka. Bahkan dalam wilayah spesialisasi atau mandat yang khusus inipun biasanya keseluruhan kebutuhan kemanusiaan akan jauh melebihi sumberdaya organisasi yang ada. Seandainya suatu organisasi ternyata mempunyai kemampuan yang berlebih, maka mereka harus memberitahukan hal itu kepada organisasi-organisasi lain yang juga memberikan respons kemanusiaan dan menawarkan sumber itu sebagai sumbangsih bilamana diperlukan.



4. **Memberitahukan kesenjangan:** kebanyakan lembaga kemanusiaan lebih suka menunjukkan keberhasilan-keberhasilan program dan evaluasi yang positif dari kegiatan mereka yang tengah berlangsung demi mendapatkan dukungan pendanaan untuk program dimasa datang. Tetapi mereka harus bersedia untuk segera mengakui jika ada kesenjangan dalam kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar.
5. **Berbagi informasi:** organisasi-organisasi yang mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dasar harus mengumumkan kepada masyarakat luas sesegera mungkin sehingga memungkinkan lembaga-lembaga yang mempunyai sumberdaya dan kemampuan yang paling tepat untuk merespons secepatnya. Bilamana memungkinkan harus digunakan peristilahan, metodologi, standar-standar, dan tatacara yang sudah dikenal dan lazim untuk memungkinkan pihak-pihak lain menggerakkan respons-respons mereka secara lebih cepat dan efektif. Tukar menukar informasi ini dapat terbantu dengan signifikan apabila semua menggunakan format-format survey yang standar dan panduan-panduan yang terkait, disepakati oleh pemerintah setempat dan lembaga-lembaga tingkat nasional.
6. **Memaksimalkan dampak positif dan membatasi dampak negatif:** konflik dan persaingan demi perebutan sumberdaya yang terbatas sering menimbulkan bahaya keamanan, penyalahgunaan, pembagian yang tidak berkeadilan dan penyelewengan bantuan. Pemahaman terhadap hakekat dan submer konflik membantu kita untuk memastikan bahwa bantuan dibagikan melalui cara-cara yang berkeadilan dan mengurangi dampak negatif. Di situasi yang terkena dampak konflik, analisis pelaku, mekanisme, isu-isu dan konteks dari konflik harus dilaksanakan sebelum perencanaan pemrograman.

## Standar umum 4: penentuan target

Bantuan atau pelayanan kemanusiaan disediakan secara berkeadilan dan tanpa berpilih kasih, berdasarkan pada kerentanan dan kebutuhan dari orang-perorangan atau kelompok-kelompok yang terkena bencana.

**Indikator-indikator kunci** (untuk dibaca bersama dengan catatan-catatan panduan)

- Kriteria penentuan target harus didasarkan pada analisis kerentanan yang menyeluruh (lihat catatan panduan 1)
- Mekanisme penentuan target disepakati bersama penduduk yang terkena bencana (termasuk perwakilan kelompok-kelompok rentan) dan pelaku-pelaku lain yang terkait. Penentuan target dilakukan dengan jelas dan diumumkan secara meluas (lihat catatan panduan 2-3)
- Penentuan target dan kriteria tidak merongrong martabat dan keamanan orang-perorangan
- Sistem-sistem distribusi dimonitor untuk memastikan bahwa kriteria penentuan target dipatuhi dan bahwa tindakan-tindakan perbaikan diambil ketika diperlukan (lihat catatan panduan 4-5)

### Catatan panduan

1. **Tujuan dari penentuan target:** adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari kelompok yang paling rentan sementara memberikan bantuan secara efektif dan secukupnya sehingga mencegah ketergantungan
2. **Mekanisme penentuan target:** adalah cara-cara dimana bantuan disediakan secara tanpa pilih kasih dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan kebutuhan, Pilihan-pilihannya termasuk penentuan target berbasis masyarakat, penentuan target secara administratif, penentuan target pribadi, dan kombinasi dari ketiga metoda ini. Pekerja lembaga kemanusiaan harus menyadari bahwa penentuan target pribadi kadang-kadang dapat mengecualikan kelompok-kelompok rentan tertentu. Untuk memastikan bahwa penduduk yang

terkena bencana dilibatkan dalam pembahasan dan bahwa mereka menyepakati keputusan-keputusan mengenai penentuan target, maka perwakilan dari golongan perempuan dan laki-laki, anak-anak laki-laki dan anak-perempuan, dan orang-orang dari kelompok rentan harus dilibatkan dalam proses konsultasi. Dalam situasi konflik, sangatlah penting untuk memahami hakekat dan sumber konflik dan bagaimana hal-hal ini mungkin mempengaruhi keputusan-keputusan administratif dan masyarakat dalam hal penentuan target penyediaan bantuan.

3. **Kriteria penentuan target:** biasanya dihubungkan dengan tingkat atau derajat kerentanan suatu masyarakat, rumah-rumahtangga atau orang-perorangan, yang pada gilirannya, ditentukan oleh risiko-risiko yang ditimbulkan oleh bencana dan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah. Martabat orang-perorangan mungkin secara tidak sengaja akan terganggu oleh kriteria dan mekanisme penentuan target yang serampangan dan upaya-upaya yang tepat harus diambil untuk menghindari kejadian semacam ini. Beberapa contoh:
  - mekanisme penentuan target berbasis masyarakat dan administratif mungkin memerlukan keterangan mengenai asset-asset orang perorangan. Pertanyaan semacam ini mungkin dianggap lancang dan berpotensi untuk merongrong struktur-struktur sosial
  - rumahtangga yang mempunyai anak kurang gizi sering menjadi sasaran untuk bantuan pangan selektif. Hal ini mungkin dapat merongrong martabat orang karena ia akan memaksa para orangtua untuk tetap membuat anak-anak mereka kurus supaya rumahtangga tetap menerima jatah bantuan pangan. Kasus semacam ini juga mungkin terjadi bahkan dalam situasi pemberian bantuan secara umum dan merata
  - dimana target bantuan ditentukan melalui sistem kekerabatan setempat, maka orang-orang yang tidak

berada dalam kategori ini (misalnya para pengungsi yang datang) sangat mungkin akan terabaikan.

- para pengungsi perempuan, anak-anak perempuan dan laki-laki mungkin dihadapkan pada risiko pemaksaan seksual
- orang-orang yang menderita HIV/AIDS mungkin dihadapkan pada stigma. Asas kerahasiaan harus dilaksanakan setiap waktu

4. **Akses dan penggunaan sarana dan pelayanan:**

penggunaan sarana-sarana dan barang-barang yang disediakan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk akses, keamanan, kemudahan, kualitas dan kepatutan sarana dan barang tersebut dengan kebutuhan dan adat istiadat. Akses mungkin sekali terbatas dalam situasi konflik bersenjata, dan oleh faktor-faktor seperti korupsi, intimidasi dan eksploitasi (termasuk eksploitasi seks). Sejauh dimungkinkan faktor-faktor yang membatasi penggunaan sarana harus diatasi melalui mobilisasi masyarakat atau peninjauan kembali program-program. Harus dipastikan bahwa konsultasi sebelum dan pada saat pelaksanaan program meliputi pembahasan yang memadai dengan melibatkan kaum perempuan, anak-anak dan kelompok-kelompok rentan lainnya, yaitu mereka-mereka yang paling dirugikan oleh pembatasan penggunaan sarana dan barang bantuan.

5. **Memonitor kesalahan-kesalahan penentuan target:**

ketika suatu sistem penentuan target gagal untuk mencapai semua orang-orang rentan yang membutuhkan bantuan akibat bencana, maka kebutuhan orang-perorangan atau kelompok-kelompok ini dengan cepat berkembang menjadi kebutuhan-kebutuhan kritis. Harus dilakukan pengaturan-pengaturan untuk pemutakhiran dan perbaikan mekanisme dan kriteria penentuan target dan sistem distribusi untuk mencapai cakupan yang lebih efektif.

## Standar umum 5: pemantauan

Efektivitas dari program untuk merespons masalah diidentifikasi dan perubahan-perubahan dalam konteks yang lebih luas secara terus menerus dimonitor, dengan tujuan untuk meningkatkan program, atau mengakhirinya sesuai dengan keperluan yang ada.

**Indikator-indikator kunci** (untuk dibaca bersama catatan-catatan panduan)

- Informasi yang dikumpulkan untuk pemantauan didapat dengan cepat dan bermanfaat, direkam dan dianalisis secara teliti, logis, konsisten, berkala dan transparan dan hasilnya digunakan untuk penyesuaian program yang tengah berlaku (lihat catatan panduan 1-2)
- Ada sistem untuk memastikan adanya pengumpulan informasi secara berkala pada setiap sektor teknis dan untuk mengidentifikasi pemenuhan indikator-indikator untuk setiap standar
- Perempuan, laki-laki, dan anak-anak dari semua kelompok yang terkena bencana diajak berkonsultasi secara berkala dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemantauan (lihat catatan panduan 3)
- Ada sistem untuk memungkinkan aliran informasi antara program, sektor-sektor lain, kelompok-kelompok penduduk yang terkena bencana, para pihak berwenang yang terkait, para donor dan pelaku-pelaku lain sebagaimana diperlukan (lihat catatan panduan 4)

### Catatan panduan

1. **Penggunaan informasi yang dihasilkan dari pemantauan:** situasi bencana sangat mudah berubah dan dinamik. Oleh karenanya informasi yang dimutakhirkan secara berkala sangat vital untuk memastikan bahwa program-program tetap relevan dan efektif. Monitoring secara berkala membantu para manager menentukan prioritas-prioritas, mengidentifikasi munculnya masalah-masalah baru, mengikuti kecenderungan, menentukan akibat dari respons, dan

memandu penyesuaian-penyesuaian program. Informasi yang didapatkan dari pemantauan program yang berkelanjutan dapat digunakan untuk peninjauan, evaluasi dan keperluan-keperluan lain. Pada beberapa situasi mungkin diperlukan suatu perubahan strategi untuk merespons suatu perubahan kebutuhan atau perubahan konteks.

2. **Menggunakan dan mendiseminasikan informasi:** informasi yang dikumpulkan harus terkait secara langsung dengan program. Dengan kata lain informasi itu harus bermanfaat dan ditindaklanjuti. Informasi juga harus didokumentasikan dan secara proaktif disediakan sebagaimana diperlukan oleh sektor-sektor dan lembaga-lembaga, dan kepada penduduk yang terkena bencana. Cara-cara yang digunakan untuk mengkomunikasikan (metoda diseminasi, bahasa, dsb.) harus sesuai dan dapat diakses oleh mereka-mereka yang memang menjadi target pengguna.
3. **Orang-orang yang terlibat dalam pemantauan:** orang-orang yang mampu mengumpulkan informasi dari semua kelompok penduduk yang terkena bencana dan melalui cara-cara yang dapat diterima secara budaya harus diikutsertakan, terutama dalam kaitannya dengan jender dan ketrampilan berbahasa. Praktek-praktek budaya setempat mungkin menuntut agar perempuan dan kelompok minoritas diajak berkonsultasi secara terpisah dan oleh orang-orang yang secara budaya dapat diterima untuk melakukan hal itu.
4. **Berbagi informasi:** kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi menuntut konsultasi dan kerjasama lintas sektoral. Misalnya, pada saat epidemi kolera, informasi harus secara terus menerus saling dibagi oleh sektor air bersih dan sanitasi dengan lembaga-lembaga kesehatan. Mekanisme koordinasi seperti pertemuan berkala dan penggunaan papan-papan pengumuman dapat membantu kegiatan saling berbagi informasi seperti ini.

## Standar umum 6: evaluasi

Ada suatu pemeriksaan yang sistematis dan imparial terhadap tindakan kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk menarik pelajaran demi meningkatkan praktek dan kebijakan dan untuk memperbaiki akuntabilitas.

**Indikator kunci** (untuk dibaca bersama catatan panduan) :

- Program dievaluasi dengan mengacu kepada sasaran yang telah dinyatakan dan standar-standar minimum yang telah disepakati untuk mengukur keseluruhan kepatutannya, efektifitas, cakupan, keruntutan pikir, dan dampaknya terhadap penduduk yang terkena bencana (lihat catatan panduan 1)
- Evaluasi mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari penduduk yang terkena bencana sebagaimana juga pendapat masyarakat setempat kalau mereka adalah kelompok yang berbeda
- Pengumpulan informasi untuk keperluan evaluasi bersifat mandiri dan imparial
- Hasil dari masing-masing kegiatan evaluasi digunakan untuk meningkatkan masa depan praktek bantuan kemanusiaan (lihat catatan panduan 2)

### Catatan panduan

1. **Menetapkan kriteria:** mengevaluasi program bantuan kemanusiaan bukan tugas yang mudah karena bencana dicirikan dengan perubahan yang cepat dan tingginya ketidakpastian. Sementara metoda kualitatif lebih mampu menangkap hakekat kerumitan respons bencana, mereka yang mengevaluasi program-program semacam itu harus bersedia untuk menggunakan metoda-metoda yang lain dan membandingkan dan menimbang hasil-hasilnya demi mencapai kesimpulan yang absah.
2. **Penggunaan informasi selanjutnya:** evaluasi harus menghasilkan laporan tertulis yang saling dibagi untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas, dan untuk memungkinkan pelajaran ditarik lintas program dan lintas lembaga sehingga menghasilkan perbaikan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek kemanusiaan.

## Standar umum 7: kompetensi dan tanggung jawab pekerja kemanusiaan

Pekerja kemanusiaan mempunyai kualifikasi yang tepat, sikap dan pengalaman untuk merencanakan dan secara efektif melaksanakan program yang tepat

**Indikator kunci** (untuk dibaca bersama-sama dengan catatan panduan)

- Pekerja-pekerja kemanusiaan mempunyai kualifikasi teknis yang relevan dan pengetahuan tentang kebudayaan dan adat istiadat setempat, dan / atau pengalaman penanganan kedaruratan. Para pekerja juga memahami hak-hak asasi manusia dan asas-asas humaniter.
- Pekerja memahami potensi ketegangan dan sumber konflik diantara para penduduk yang terkena bencana sendiri dan dengan masyarakat setempat. Mereka sadar akan implikasi dari pemberian bantuan kemanusiaan, dan sungguh memperhatikan kelompok-kelompok rentan (lihat catatan panduan 1)
- Pekerja dapat mengenali tindakan-tindakan yang melecehkan, diskriminatif atau menyalahi hukum dan menahan diri dari melakukan tindakan semacam itu (lihat catatan panduan 2)

### Catatan panduan

1. **Pekerja perlu menyadari:** sejauh mana kejahatan kekerasan, termasuk pemerkosaan dan banyak lagi bentuk keganasan terhadap perempuan, para gadis dan anak-anak laki-laki dapat meningkat selama masa krisis. Ketakutan akan pelecehan dan pemerkosaan memaksa para perempuan untuk melakukan persekutuan dengan para tentara dan laki-laki lain yang memegang posisi kekuasaan atau kekuatan. Remaja laki-laki rentan terhadap pemaksaan untuk menjadi anggota pasukan bersenjata. Pekerja dan para mitra lapangan harus mengetahui bagaimana merujuk para perempuan, laki-



laki, dan anak-anak yang ingin mencari penindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan memahami tatacara untuk merujuk korban perkosaan dan kekerasan seksual untuk konseling, dan pelayanan medis dan kontraseptif.

2. **Pekerja harus memahami:** bahwa tanggung jawab atas manajemen dan alokasi sumberdaya yang langka dan berharga dalam rangka program respons bencana menempatkan diri mereka dan orang-orang lain yang terlibat didalamnya pada posisi yang relatif lebih kuat di mata para penduduk terkena bencana. Pekerja harus waspada terhadap bahaya bahwa kekuatan ini dapat digunakan untuk korupsi dan dapat disalahgunakan. Pekerja harus sadar bahwa perempuan dan anak-anak sering disudutkan pada situasi yang hina, merendahkan dan eksploitatif. Kegiatan seksual tidak boleh diminta sebagai imbalan untuk bantuan kemanusiaan, dan pekerja kemanusiaan tidak boleh mengambil bagian dalam bentuk-bentuk transaksi semacam itu. Kegiatan-kegiatan seperti perburuan paksa, dan penggunaan dan perdagangan obat terlarang juga tidak diperbolehkan.

### **Standar umum 8: supervisi, manajemen, dan dukungan terhadap personil**

Pekerja kemanusiaan menerima supervisi dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan program bantuan kemanusiaan secara efektif

**Indikator kunci** (untuk dibaca bersama catatan panduan)

- Manajer bertanggung jawab atas keputusan-keputusan mereka dan untuk memastikan bahwa keamanan yang memadai dan dipatuhinya kode etik atau peraturan demikian juga tersedianya dukungan yang memadai untuk pekerja mereka (lihat catatan panduan 1)

- Pekerja teknis dan manajerial diberikan pelatihan yang diperlukan, dukungan sumberdaya dan logistik untuk memungkinkan mereka menunaikan tanggung jawab mereka (lihat catatan panduan 2)
- Pekerja yang bekerja untuk program memahami tujuan dan metoda dari kegiatan-kegiatan yang harus mereka laksanakan, dan menerima umpan balik tentang kinerja mereka
- Semua pekerja mempunyai deskripsi tugas tertulis dengan garis pelaporan yang jelas dan melaksanakan pengkajian kinerja tertulis secara berkala
- Semua pekerja diberikan orientasi tentang isu-isu kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan wilayah dan lingkungan dimana mereka akan ditugaskan untuk bekerja (lihat catatan panduan 3)
- Sistem penguatan kapasitas untuk pekerja disusun dan aspek ini dimonitor secara rutin (lihat catatan panduan 4)
- Kemampuan organisasi-organisasi lokal dan nasional dibina untuk mendorong keberlanjutan jangka panjang

#### **Catatan panduan**

1. **Manajer di semua tataran:** mempunyai tanggung jawab khusus untuk menyusun dan atau menjaga sistem-sistem yang mendorong pelaksanaan program, kebijakan-kebijakan yang relevan, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan / kode etik. Beberapa lembaga kemanusiaan sudah mempunyai kode atau peraturan yang berkaitan dengan pekerja dan perilaku kelembagaan sehubungan dengan isu-isu seperti perlindungan anak-anak atau eksploitasi dan pelecehan seksual. Karena pentingnya peraturan semacam itu sudah diakui secara luas, maka banyak lembaga-lembaga kemanusiaan yang tengah mengembangkan kode etik semacam itu. Tanggung jawab manajerial untuk memastikan kepatuhan pada peraturan adalah suatu aspek krusial dalam keberhasilan kode etik semacam itu.
2. **Lembaga-lembaga kemanusiaan:** harus memastikan bahwa pekerja memang berkualifikasi dan kompeten, serta terlatih secara memadai dan dipersiapkan sebelum ditugaskan ke situasi darurat. Ketika menurunkan tim-

tim kedaruratan, lembaga-lembaga harus mengusahakan keseimbangan jumlah antara perempuan dan laki-laki diantara pekerja dan relawan. Dukungan dan pelatihan yang berkelanjutan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja dapat menunaikan tanggung jawab mereka.

3. **Semua pekerja:** harus menerima briefing yang memadai tentang isu-isu keamanan dan kesehatan baik sebelum penugasan mereka dan ketika mereka tiba di lokasi kerja. Mereka harus diberi vaksinasi dan pengobatan profilaksis malaria (dimana diperlukan) sebelum penugasan. Pada saat ketibaan, mereka harus diberi informasi yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko keamanan, dan juga harus diberi briefing tentang keamanan pangan dan air bersih, HIV/AIDS dan penyakit-penyakit infeksi endemik lainnya, ketersediaan pemeliharaan kesehatan, kebijakan dan tatacara evakuasi medik, dan kompensasi untuk mereka.
4. **Upaya-upaya khusus:** harus dilakukan untuk menggalakkan keanekaragaman pada berbagai tataran di suatu organisasi
5. **Penguatan kapasitas:** dinyatakan secara tersurat sebagai suatu sasaran pada tahap rehabilitasi sesudah bencana. Kegiatan ini harus dilakukan, sejauh memungkinkan, pada saat bencana atau bantuan darurat itu sendiri, khususnya apabila kedaruratannya berkepanjangan.

# Lampiran 1

## Daftar acuan

Ucapan terimakasih kepada program Forced Migration Online dari Refugee Studies Centre pada University of Oxford, banyak diantara dokumen-dokumen ini telah mendapatkan ijin hak cipta dan dicantumkan pada link khusus di website Sphere: <http://www.forcedmigration.org>

## Partisipasi

ALNAP Global Study: Participation by Affected Populations in Humanitarian Action: Practitioner Handbook (forthcoming). <http://www.alnap.org>

<http://www.hapgeneva.org>

## Pengkajian dan respons

UNHCR, *Handbook for Emergencies* (2000). <http://www.unhcr.ch>

Field Operations Guidelines for Assessment and Response (FOG, 1998). USAID. <http://www.info.usaid.gov/ofda>

Demographic Assessment Techniques in Complex Humanitarian Emergencies: Summary of a Workshop (2002). <http://books.nap.edu/books/0309084970/html>

Humanity Development Library: <http://humaninfo.org>

OCHA Humanitarian Information Centres: <http://www.humanitarianinfo.org>

OCHA (1999), *Orientation Handbook on Complex Emergencies*. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. United Nations. New York.

Relief Web Humanitarian Library: <http://www.reliefweb.int/library>

Telford, J (1997), Good Practice Review 5: Counting and Identification of Beneficiary Populations in Emergency Operations: Registration and its Alternatives. Relief and Rehabilitation Network/Overseas Development Institute. London.

## Penentuan sasaran

*Humanitarian Ethics in Disaster and War*. IFRC, 2003. <http://www.ifrc.org/publicat/wdr2003/chapter1.asp>

International Food Policy Research Institute Training Material, *Targeting: Principles and Practice*. <http://www.reliefweb.int/training/ti1227.htm>

Vincent, M, Refslund Sorensen, B. (eds.) (2001), *Caught Between Borders, Response Strategies of the Internally Displaced*. Norwegian Refugee Council.

International Strategy for Disaster Reduction, *Countering Disasters, Targeting Vulnerability*. UN/ISDR, 2001. <http://www.unisdr.org>

### **Pemantauan dan evaluasi**

ALNAP Annual Review (2001), *Humanitarian Action: Learning from Evaluation*. <http://www.alnap.org>

ALNAP Annual Review (2003), *Humanitarian Action: Improving Pemantauan to Enhance Accountability and Learning*. <http://www.alnap.org>

*Guidance for Evaluation of Humanitarian Assistance in Complex Emergencies*, (1999). Overseas Economic Cooperation for Development (OECD). Paris. <http://www.oecd.org/dac>

*Manual for the Evaluation of Humanitarian Aid*. European Community Humanitarian Office Evaluation Unit, Brussels, 2002. <http://europa.eu.int>

### **Personil**

The People in Aid Code of Good Practice in the Management and Support of Aid Personnel 2003. People in Aid. <http://peopleinaid.org>

### **Anak-anak**

*Action for the Rights of the Child (ARC)*. Save the Children Alliance and UNHCR, 1998.

Children Not Soldiers, Guidelines for Working with Child Soldiers and Children Associated with Fighting Forces. Save the Children.

Gosling, L and Edwards, M, *Toolkits – A Practical Guide to Planning, Pemantauan, Evaluation and Impact Assessment*. Save the Children.

Inter-Agency Working Group on Unaccompanied and Separated Children, *Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children* (forthcoming).

### **Penyandang cacat**

<http://www.annenberg.nwu.edu/pubs/disada/>

<http://www.fema.gov/rrr/assistf.shtm>

<http://www.redcross.org/services/disaster/beprepared/disability.pdf>

## Lingkungan

<http://www.benfieldhrc.org/disastersstudies/projects/REA>  
Environmental assessment resources for small-scale activities:  
<http://www.encapafrica.org>  
[www.reliefweb.int/ochaunep](http://www.reliefweb.int/ochaunep)

## Jender

Beck, T and Stelcner, M (1996), *Guide to Gender-Sensitive Indicators*.  
Canadian International Development Agency (CIDA). Quebec.

Dugan, J, Assessing the Opportunity for Sexual Violence against Women and  
Children in Refugee Camps. Journal of Humanitarian

Assistance, August 2000. <http://www.jha.ac/articles>

Enarson, E (2000), *Gender and Natural Disasters*, Working Paper, In Focus  
Programme on Crisis Responsse and Reconstruction. ILO.

FAO, *Gender in Emergencies Annex: manuals, guidelines, major documents*:  
<http://www.fao.org>

FAO/WFP (2003), *Passport to Mainstreaming a Gender Perspective in  
Emergency Programmes*.

Gender and Disaster Network: <http://www.anglia.ac.uk>

Gender and Humanitarian Assistance Resource Kit:  
<http://www.reliefweb.int/library/GHARKit>

UNHCR, *Guidelines on the Protection of Refugee Women*.

UNICEF (1999), *Mainstreaming Gender in Unstable Environments*.  
<http://www.reliefweb.int/library>

## HIV/AIDS

Holmes W (2003), *Protecting the Future: HIV Prevention, Care, and Support  
Among Displaced and War-Affected Populations*. International Rescue  
Committee. Kumarian Press, New York.

Inter-Agency Field Manual. Reproductive Health in Refugee Situations.  
UNHCR/WHO/UNFPA. Geneva, 1999.

Inter-Agency Standing Committee (IASC) on HIV/AIDS in Emergency  
Settings. *Guidelines for HIV/AIDS Interventions in Emergency Settings* (draft).  
IASC, 2003: 85. Geneva.

Family Health International (FHI) (2001), *HIV/AIDS Prevention and Care in Resource-Constrained Settings: A Handbook for the Design and Management of Programs*. Virginia.

## **Para Lanjut Usia**

HelpAge International, *Older People in Disaster and Humanitarian Crises: Guidelines for Best Practice*. Available in English, French, Spanish and Portuguese. <http://www.helpage.org>

Madrid International Plan of Action on Ageing, Report of the Second World Assembly on Ageing, Madrid, 8-12 April 2002, A/CONF.197/9 Paragraphs 54-56. <http://www.un.org>

UNHCR, *Policy on Older Refugees* (as endorsed at the 17th Meeting of the Standing Committee February/March 2000). EC/50/SC/CRP.13

United Nations Principles for Older Persons. <http://www.un.org>

## **Perlindungan**

Agenda for Protection. UNHCR. Geneva, 2002.

Frohardt, M, Paul, D and Minear, L (1999), *Protecting Human Rights: The Challenge to Humanitarian Organisations*. Occasional Paper 35, Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies, Brown University.

Growing the Sheltering Tree: Protecting Rights Through Humanitarian Action, Programmes and Practice Gathered from the Field. Inter-Agency Standing Committee, Geneva.

Protecting Refugees: A Field Guide for NGOs. UNHCR. Geneva, 1999

Strengthening Protection in War: A Search for Professional Standards. ICRC. Geneva, 2001.

OCHA, *Protection of Civilians in Armed Conflict*.  
[http://www.reliefweb.int/ocha\\_ol/civilians/](http://www.reliefweb.int/ocha_ol/civilians/)